



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka I nomor 35 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Dampaknya sehingga Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3723);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, semula berjumlah Rp1.269.031.108.477,00 berkurang sejumlah Rp4.113.587.000,00 sehingga menjadi Rp1.264.917.521.477,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula	Rp1.245.531.108.477,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp 4.113.587.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.241.417.521.477,00

2. Belanja:

a. Semula	Rp1.269.031.108.477,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 4.113.587.000,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.264.917.521.477,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 23.500.000.000,00)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan:

1) Semula	Rp25.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp. NIHIL )
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp25.000.000.000,00

b. Pengeluaran:

1) Semula	Rp1.500.000.000,00
-----------	--------------------

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.	NIHIL
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 23.500.000.000.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.	NIHIL

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Kepala Bagian Hukum  
Kasubbag. Perundang-Undangan,

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI BULUNGAN,

MUHAMMAD HATTA,SH.,MH  
Penata / IIIc  
NIP. 197501082003121003

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.245.531.108.477,00	1.225.332.271.477,00	(20.198.837.000,00)	(1,62)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	108.924.480.000,00	108.924.480.000,00	0,00	0,00	
4.1.01	<b>Pajak Daerah</b>	21.985.000.000,00	21.985.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 01 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 14 . 12	Pajak Granit/Andesit	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 14 . 23	Pajak Pasir dan Kerikil	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 14 . 28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 14 . 37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 15 . 01	PBBP2	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 16 . 02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02	<b>Retribusi Daerah</b>	5.673.480.000,00	5.673.480.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.255.000.000,00	1.255.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.765.980.000,00	3.765.980.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	301.000.000,00	301.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.818.000.000,00	1.818.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 04	Retribusi Terminal	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	812.000.000,00	812.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	388.980.000,00	388.980.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	652.500.000,00	652.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 03 . 03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 03 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 03 . 01 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	66.266.000.000,00	66.266.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.695.000.000,00	6.695.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.695.000.000,00	6.695.000.000,00	0,00	0,00	
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.110.906.628.477,00	1.090.707.791.477,00	(20.198.837.000,00)	(1,82)	
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	1.050.802.884.000,00	1.030.604.047.000,00	(20.198.837.000,00)	(1,92)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	931.693.620.000,00	911.494.783.000,00	(20.198.837.000,00)	(2,17)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	148.454.342.000,00	148.454.342.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	541.744.074.000,00	524.393.445.000,00	(17.350.629.000,00)	(3,20)	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	175.750.874.000,00	172.902.666.000,00	(2.848.208.000,00)	(1,62)	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	65.744.330.000,00	65.744.330.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	25.444.230.000,00	25.444.230.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	25.444.230.000,00	25.444.230.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	93.665.034.000,00	93.665.034.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	93.665.034.000,00	93.665.034.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	60.103.744.477,00	60.103.744.477,00	0,00	0,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	60.103.744.477,00	60.103.744.477,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.103.744.477,00	60.103.744.477,00	0,00	0,00	
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01	<b>Pendapatan Hibah</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3.03	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	1.269.031.108.477,00	1.248.832.271.477,00	(20.198.837.000,00)	(1,59)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	877.134.785.230,00	872.016.711.360,17	(5.118.073.869,83)	(0,58)	
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	516.564.184.841,00	516.811.068.427,58	246.883.586,58	0,05	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	251.103.850.724,00	243.922.040.909,58	(7.181.809.814,42)	(2,86)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	183.790.383.729,00	179.665.576.553,62	(4.124.807.175,38)	(2,24)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.726.292.436,00	19.030.916.959,00	(1.695.375.477,00)	(8,18)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.120.516.414,00	6.931.648.852,38	(1.188.867.561,62)	(14,64)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.915.485.342,00	10.471.825.510,00	(1.443.659.832,00)	(12,12)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.094.206.444,00	3.681.416.044,00	(412.790.400,00)	(10,08)	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.525.524.447,00	11.120.555.726,00	(404.968.721,00)	(3,51)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	969.685.940,00	905.451.085,00	(64.234.855,00)	(6,62)	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	128.601.652,00	99.643.649,00	(28.958.003,00)	(22,52)	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.833.154.320,00	10.015.006.530,58	2.181.852.210,58	27,85	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	153.521.995.951,00	158.655.766.774,00	5.133.770.823,00	3,34	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	102.297.489.861,00	123.129.380.425,00	20.831.890.564,00	20,36	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	21.468.519.741,00	20.479.200.000,00	(989.319.741,00)	(4,61)	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.208.912.466,00	4.500.112.466,00	291.200.000,00	6,92	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	25.547.073.883,00	10.547.073.883,00	(15.000.000.000,00)	(58,72)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.717.258.000,00	58.012.180.578,00	2.294.922.578,00	4,12	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.099.250.000,00	1.099.250.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	283.724.000,00	283.805.250,00	81.250,00	0,03	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	3.118.592.600,00	41.946.893.988,00	38.828.301.388,00	1.245,06	
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	639.315.340,00	639.315.340,00	0,00	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	37.398.971.400,00	682.013.000,00	(36.716.958.400,00)	(98,18)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.417.255.000,00	11.019.903.000,00	(397.352.000,00)	(3,48)	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.399.465.000,00	2.341.000.000,00	(58.465.000,00)	(2,44)	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.969.091.810,00	15.969.091.810,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	629.320.725,00	629.320.725,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	116.879.900,00	116.879.900,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	218.494.980,00	218.494.980,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	66.662.180,00	66.662.180,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	897.232.880,00	897.232.880,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.790.240,00	134.790.240,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	317.622.920,00	317.622.920,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	69.354.900,00	69.354.900,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.183.660.200,00	5.183.660.200,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.992.274.960,00	3.992.274.960,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	405.157.925,00	405.157.925,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	351.118.344,00	351.118.344,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	165.797.650,00	165.797.650,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	24.171.800,00	24.171.800,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	118.466.000,00	118.466.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	23.258.084,00	23.258.084,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	19.421.888,00	19.421.888,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	829.500.856,00	829.500.856,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	517.020.856,00	517.020.856,00	0,00	0,00	
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	6.690.735.000,00	6.690.735.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	6.690.735.000,00	6.690.735.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	32.380.634.156,00	32.380.634.156,00	0,00	0,00	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	32.380.634.156,00	32.380.634.156,00	0,00	0,00	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	338.214.434.284,00	325.702.552.827,59	(12.511.881.456,41)	(3,70)	
5.1.02.01	Belanja Barang	59.582.452.798,00	80.764.315.456,01	21.181.862.658,01	35,55	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	59.549.437.068,00	80.734.449.719,01	21.185.012.651,01	35,58	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	33.015.730,00	29.865.737,00	(3.149.993,00)	(9,54)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.02	Belanja Jasa	142.319.271.611,00	129.535.158.004,43	(12.784.113.606,57)	(8,98)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.846.656.238,00	113.653.265.567,43	(12.193.390.670,57)	(9,69)	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.395.189.070,00	12.912.366.134,00	(482.822.936,00)	(3,60)	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	153.371.000,00	137.371.000,00	(16.000.000,00)	(10,43)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	422.100.000,00	413.200.000,00	(8.900.000,00)	(2,11)	
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	454.126.000,00	454.126.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.494.329.303,00	1.439.329.303,00	(55.000.000,00)	(3,68)	
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	95.500.000,00	95.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.692.079.531,00	7.020.892.135,58	(11.671.187.395,42)	(62,44)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.185.146.200,00	4.039.168.260,63	(145.977.939,37)	(3,49)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.409.958.331,00	807.618.874,95	(11.602.339.456,05)	(93,49)	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.096.975.000,00	2.174.105.000,00	77.130.000,00	3,68	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	72.470.809.500,00	63.179.566.387,57	(9.291.243.112,43)	(12,82)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.470.809.500,00	63.179.566.387,57	(9.291.243.112,43)	(12,82)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	312.950.000,00	365.750.000,00	52.800.000,00	16,87	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	312.950.000,00	365.750.000,00	52.800.000,00	16,87	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	23.958.225.000,00	23.958.225.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	23.958.225.000,00	23.958.225.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.878.645.844,00	20.878.645.844,00	0,00	0,00	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.878.645.844,00	20.878.645.844,00	0,00	0,00	
5.1.05	<b>Belanja Hibah</b>	21.856.166.105,00	29.003.090.105,00	7.146.924.000,00	32,70	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.154.197.250,00	28.301.121.250,00	7.146.924.000,00	33,78	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.068.617.250,00	22.215.541.250,00	7.146.924.000,00	47,43	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.335.000.000,00	4.335.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 05 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.750.580.000,00	1.750.580.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	701.968.855,00	701.968.855,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 07 . 01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	701.968.855,00	701.968.855,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	219.414.160.247,00	206.068.460.116,83	(13.345.700.130,17)	(6,08)	
5 . 2 . 02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	45.762.341.430,00	46.388.441.675,83	626.100.245,83	1,37	
5 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Besar	702.652.996,00	699.892.996,00	(2.760.000,00)	(0,39)	
5 . 2 . 02 . 01 . 01	Belanja Modal Alat Besar Darat	43.133.000,00	43.133.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 01 . 03	Belanja Modal Alat Bantu	659.519.996,00	656.759.996,00	(2.760.000,00)	(0,42)	
5 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.321.892.600,00	3.246.852.600,00	(75.040.000,00)	(2,26)	
5 . 2 . 02 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.296.666.600,00	3.221.626.600,00	(75.040.000,00)	(2,28)	
5 . 2 . 02 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 02 . 03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	22.176.000,00	22.176.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	23.172.727,00	23.172.727,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 03 . 03	Belanja Modal Alat Ukur	23.172.727,00	23.172.727,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 04	Belanja Modal Alat Pertanian	50.058.025,00	15.958.025,00	(34.100.000,00)	(68,12)	
5 . 2 . 02 . 04 . 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	50.058.025,00	15.958.025,00	(34.100.000,00)	(68,12)	
5 . 2 . 02 . 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.833.865.259,00	1.750.039.879,00	(83.825.380,00)	(4,57)	
5 . 2 . 02 . 05 . 01	Belanja Modal Alat Kantor	257.058.874,00	221.512.197,00	(35.546.677,00)	(13,83)	
5 . 2 . 02 . 05 . 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.510.817.327,00	1.462.538.624,00	(48.278.703,00)	(3,20)	
5 . 2 . 02 . 05 . 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	65.989.058,00	65.989.058,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.199.242.920,00	1.006.650.395,00	(192.592.525,00)	(16,06)	
5 . 2 . 02 . 06 . 01	Belanja Modal Alat Studio	757.383.958,00	414.791.433,00	(342.592.525,00)	(45,23)	
5 . 2 . 02 . 06 . 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	75.978.361,00	225.978.361,00	150.000.000,00	197,42	
5 . 2 . 02 . 06 . 03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	365.880.601,00	365.880.601,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.696.859.077,00	20.185.665.327,00	488.806.250,00	2,48	
5 . 2 . 02 . 07 . 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	18.762.298.827,00	19.403.865.077,00	641.566.250,00	3,42	
5 . 2 . 02 . 07 . 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	934.560.250,00	781.800.250,00	(152.760.000,00)	(16,35)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	8.587.413.545,00	9.340.874.795,00	753.461.250,00	8,77	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	531.027.595,00	1.284.488.845,00	753.461.250,00	141,89	
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	8.055.054.950,00	8.055.054.950,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.211.752.183,00	2.994.558.361,83	(217.193.821,17)	(6,76)	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.440.672.246,00	2.236.721.874,83	(203.950.371,17)	(8,36)	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	771.079.937,00	757.836.487,00	(13.243.450,00)	(1,72)	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	210.100.000,00	210.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	210.100.000,00	210.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	38.492.520,00	38.492.520,00	0,00	0,00	
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	38.492.520,00	38.492.520,00	0,00	0,00	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	94.049.578,00	83.394.050,00	(10.655.528,00)	(11,33)	
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	94.049.578,00	83.394.050,00	(10.655.528,00)	(11,33)	
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.840.490.000,00	5.840.490.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.840.490.000,00	5.840.490.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	951.000.000,00	951.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	951.000.000,00	951.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	82.202.368.488,00	93.484.337.594,00	11.281.969.106,00	13,72	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	81.238.415.164,00	92.668.144.269,00	11.429.729.105,00	14,07	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.587.829.932,00	87.029.559.037,00	11.441.729.105,00	15,14	
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.650.585.232,00	5.638.585.232,00	(12.000.000,00)	(0,21)	
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	143.680.000,00	0,00	(143.680.000,00)	(100,00)	
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	143.680.000,00	0,00	(143.680.000,00)	(100,00)	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	600.273.324,00	596.193.325,00	(4.079.999,00)	(0,68)	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	600.273.324,00	596.193.325,00	(4.079.999,00)	(0,68)	
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	89.078.538.729,00	63.985.926.247,00	(25.092.612.482,00)	(28,17)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	56.145.157.434,00	45.938.861.730,00	(10.206.295.704,00)	(18,18)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	48.525.826.409,00	39.119.373.922,00	(9.406.452.487,00)	(19,38)	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.619.331.025,00	6.819.487.808,00	(799.843.217,00)	(10,50)	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	25.410.944.295,00	14.213.616.517,00	(11.197.327.778,00)	(44,06)	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.060.592.402,00	7.913.827.502,00	(2.146.764.900,00)	(21,34)	
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.139.425.000,00	1.177.275.000,00	37.850.000,00	3,32	
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.795.495.000,00	2.801.225.000,00	5.730.000,00	0,20	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	4.072.000.000,00	1.965.650.122,00	(2.106.349.878,00)	(51,73)	
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	7.026.933.000,00	39.140.000,00	(6.987.793.000,00)	(99,44)	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	316.498.893,00	316.498.893,00	0,00	0,00	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.740.368.000,00	1.740.368.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	485.298.000,00	485.298.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	1.185.070.000,00	1.185.070.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.762.069.000,00	2.073.080.000,00	(3.688.989.000,00)	(64,02)	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.391.749.000,00	702.760.000,00	(3.688.989.000,00)	(84,00)	
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.370.320.000,00	1.370.320.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	2.370.911.600,00	2.209.754.600,00	(161.157.000,00)	(6,80)	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	365.365.000,00	361.515.000,00	(3.850.000,00)	(1,05)	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	199.815.000,00	199.815.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	165.550.000,00	161.700.000,00	(3.850.000,00)	(2,33)	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	78.377.000,00	56.070.000,00	(22.307.000,00)	(28,46)	
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	55.310.000,00	56.070.000,00	760.000,00	1,37	
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	23.067.000,00	0,00	(23.067.000,00)	(100,00)	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	711.169.600,00	576.169.600,00	(135.000.000,00)	(18,98)	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	711.169.600,00	576.169.600,00	(135.000.000,00)	(18,98)	
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.216.000.000,00	1.216.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.216.000.000,00	1.216.000.000,00	0,00	0,00	
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.3.01	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	0,00	0,00	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	0,00	0,00	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	0,00	0,00	
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	166.232.163.000,00	164.497.100.000,00	(1.735.063.000,00)	(1,04)	
5.4.01	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	2.765.948.000,00	2.765.948.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.765.948.000,00	2.765.948.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	2.765.948.000,00	2.765.948.000,00	0,00	0,00	
5.4.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	163.466.215.000,00	161.731.152.000,00	(1.735.063.000,00)	(1,06)	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	163.466.215.000,00	161.731.152.000,00	(1.735.063.000,00)	(1,06)	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	163.466.215.000,00	161.731.152.000,00	(1.735.063.000,00)	(1,06)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(23.500.000.000,00)	(23.500.000.000,00)	0,00	0,00	
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.01	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Salinan sesuai dengan aslinya  
 An. Kepala Bagian Hukum  
 Kasubbag. Perundang-Undangan,

MUHAMMAD HATTA, SH.,MH  
 Penata / IIIc  
 NIP. 197501082003121003

Tanjung Selor, 26 April 2021  
**BUPATI BULUNGAN**

ttd

**SYARWANI, S. Pd., M. Si**